



LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Artikel Berita Penolakan Makan Bergizi Gratis di Papua

Lampiran 1.1 Artikel Berita Pada Kompas.com

No	Judul, Tanggal, Link	Isi Berita
1	<p>Pelajar Papua Tolak MBG, Mendikdasmen: Program Ini Akan Terus Dievaluasi Tanggal : 04 Februari 2025</p> <p>Link : https://nasional.kompas.com/read/2025/02/04/20185471/soal-pelajar-papua-tolak-mbg-mendikdasmen-program-ini-akan-terus-dievaluasi</p> 	<p>JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan, program makan bergizi gratis (MBG) bakal terus dievaluasi dan disempurnakan demi mendukung kesehatan murid-murid sekolah.</p> <p>Hal ini disampaikan Abdul Mu'ti merespons pelajar Papua yang menolak program MBG.</p> <p>"Ya, program ini nantikan masih terus akan dievaluasi dan juga akan terus disempurnakan," ujar Mu'ti saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).</p> <p>Mu'ti menuturkan, berbagai kasus yang terjadi selama masa program MBG ini berjalan akan menjadi evaluasi untuk penyempurnaan.</p> <p>"Berbagai kasus yang terjadi di lapangan tentu akan menjadi input untuk penyempurnaan program MBG ini pada masa yang akan datang," kata dia.</p> <p>Mu'ti pun menegaskan, Kemendikdasmen sepenuhnya mendukung program MBG karena anak-anak membutuhkan makan bergizi selama masa pertumbuhan.</p> <p>"Keterpenuhan gizi memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan stamina yang prima," kata dia.</p> <p>Menurut Mu'ti, program MBG juga mendukung penguatan pendidikan sejak dini, mengingat sasaran program tersebut dari siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.</p> <p>"Stamina yang prima itu sangat mendukung semangat dan energi para murid untuk senantiasa belajar dan bersemangat dalam menuntut ilmu," katanya.</p> <p>Sebelumnya, viral di media sosial X yang memperlihatkan ratusan pelajar dari berbagai tingkatan pendidikan di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menolak makan bergizi gratis.</p> <p>Dinarasikan bahwa penolakan program MBG terjadi di Yahukimo, West Papua, pada Senin (3/2/2025).</p> <p>Tuntutan lainnya adalah para pelajar disebut lebih membutuhkan pendidikan yang layak daripada makan gratis.</p>
2	<p>Makan Bergizi Gratis di Papua Dapat Ancaman TPNPB OPM, TNI: Kami Tak Gentar Tanggal: 04 Februari 2025</p>	<p>JAKARTA, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk anak-anak di Papua mendapat ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM).</p>

<p>Link: https://nasional.kompas.com/read/2025/02/04/20575041/makan-bergizi-gratis-di-papua-dapat-ancaman-tpnpb-opm-tni-kami-tak-gentar</p> 	<p>Meski demikian, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudhayana memastikan bahwa tidak terpengaruh dan akan terus menjalankan program tersebut demi kesejahteraan anak-anak di Papua.</p> <p>Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gentar menghadapi ancaman apa pun yang datang.</p> <p>“Kami, dari TNI Angkatan Darat, secara umum tidak pernah terpengaruh dan gentar dengan ancaman apa pun,” kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/2/2025).</p> <p>“Tujuan kami adalah untuk kesejahteraan anak-anak di semua wilayah Indonesia, agar mereka memiliki kesehatan yang lebih baik dan gizi yang cukup. Dengan demikian, mereka akan lebih sejahtera dan pintar,” ujarnya lagi.</p> <p>Wahyu juga menambahkan bahwa pihaknya akan memperketat pengamanan agar program makan bergizi gratis dapat berjalan dengan lancar.</p> <p>“Kita akan melanjutkan program ini dengan pengamanan yang lebih ketat, memastikan semuanya berjalan baik,” ujarnya.</p> <p>“Operasi di Papua bukan di bawah kendali kami, tetapi di bawah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III). Namun, yang jelas, kita akan terus menjalankan program ini demi anak-anak kita,” kata Wahyu lagi.</p> <p>Sementara itu, Aspotwil Kaskogabwilhan III, Brigjen TNI Yudhi Prasetyo mengungkapkan bahwa OPM telah melakukan gangguan sejak awal pelaksanaan program.</p> <p>Salah satunya adalah dengan menyebarkan ancaman dan informasi bohong melalui selebaran serta media sosial.</p> <p>“Sejak awal, mereka menyebarkan hoaks bahwa makanan dalam program ini telah diracun, seolah-olah program ini merusak masa depan anak-anak Papua,” ujar Yudhi.</p> <p>Akibat ancaman tersebut, muncul keresahan di kalangan masyarakat, terutama para guru yang bertugas di daerah tersebut.</p> <p>Namun, TNI dan aparat keamanan telah berusaha melakukan pendekatan kepada masyarakat dan tenaga pengajar agar tidak takut dan tetap menjalankan tugas mereka.</p> <p>“Kami telah melakukan sosialisasi kepada para guru melalui Koramil, Polsek, hingga Babinsa. Kami meyakinkan bahwa keamanan tetap dijaga dan stabilitas wilayah tetap terjaga, khususnya di daerah seperti Intan Jaya,” katanya.</p> <p>Brigjen Yudhi menegaskan bahwa ketakutan para guru dapat berdampak pada anak-anak yang seharusnya tetap bersekolah. Oleh karena itu, dia mengimbau para guru agar tetap menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut.</p> <p>“Kalau guru saja takut, lalu anak-anak murid ikut takut, siapa yang akan mendidik mereka? Ini adalah perjuangan bersama, kita harus berani melawan rasa takut. Tetap bersekolah, tetap menerima ilmu,” ujarnya.</p>
---	---

		<p>Menanggapi pertanyaan terkait peningkatan keamanan pasca-ancaman, Yudhi menegaskan bahwa aparat keamanan tetap siaga seperti biasa.</p> <p>“Pengamanan tetap seperti biasa, melalui jajaran aparat di Polsek, Koramil, dan TNI. Yang terpenting adalah kerja sama dari semua pihak agar program makan bergizi gratis ini bisa berjalan optimal, terutama di daerah rawan seperti Papua,” katanya.</p> <p>Sebelumnya, TPNPB OPM Kodap VIII Intan Jaya mengancam akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program makan bergizi gratis.</p> <p>Hal tersebut diutarakan oleh Panglima Kodap VIII Brigjen Undius Kogoya. Menurut dia, program makan bergizi adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda yang ada di Papua.</p> <p>"Makan itu mengandung bahan berbahaya yang bisa meracuni generasi Papua jangka panjang," ujar Undius.</p> <p>"Kami tidak segan membakar sekolah dan membunuh para pengkhianat di Intan Jaya," katanya lagi.</p>
3	<p>OPM Tolak MBG dan Ancam Bakar Sekolah, Badan Gizi: Itu Tugas TNI dan Polri Tanggal: 04 Februari 2025 Link: https://nasional.kompas.com/read/2025/02/04/13001971/opm-tolak-mbg-dan-ancam-bakar-sekolah-badan-gizi-itu-tugas-tni-dan-polri</p> 	<p>JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak mau berkomentar banyak mengenai sikap Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menolak program makan bergizi gratis (MBG) dan mengancam akan bakar sekolah.</p> <p>Dadan mengatakan, ancaman keamanan tersebut merupakan tugas TNI dan Polri, bukan BGN.</p> <p>“Ini sudah berkaitan dengan tugas fungsi TNI dan Polri,” kata Dadan kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025).</p> <p>Namun, Dadan enggan berkomentar lebih jauh soal ancaman yang dilayangkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM tersebut.</p> <p>Ia beralasan ingin fokus pada tugasnya melaksanakan program MBG.</p> <p>“Maaf ya kalau saya fokus pada MBG (saja),” kata Dadan.</p> <p>Sebelumnya, muncul ancaman dari TNPBP OPM Kodap VIII Intan Jaya mengancam akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program Makan Bergizi Gratis.</p> <p>Mereka menilai, program MBG adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua.</p>
4	<p>Tak Hanya soal Keamanan, MBG Butuh Kepercayaan Masyarakat Papua untuk Cegah Penolakan Tanggal: 05 februari 2025 Link: https://nasional.kompas.com/read/2025/02/05/10214341/tak-hanya-soal-keamanan-mbg-butuh-kepercayaan-masyarakat-papua-untuk-cegah</p>	<p>JAKARTA, KOMPAS.com - TNI dan Polri dituntut untuk lebih turun ke masyarakat usai adanya penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.</p> <p>“Pendekatan keamanan tentu penting, tetapi tidak akan cukup jika tidak diimbangi dengan pendekatan sosial dan komunikasi yang baik,” ujar Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/2/2025). Khairul Fahmi berpendapat, penguatan intelijen dan peningkatan intensitas patroli dibutuhkan imbas ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).</p>

		<p>Namun, aparat keamanan diharapkan dapat membangun komunikasi dengan masyarakat setempat supaya muncul rasa kepemilikan yang melekat kepada program MBG.</p> <p>“Jika masyarakat merasa memiliki program ini, maka kemungkinan sekolah menjadi target serangan bisa diminimalisir,” kata Khairul.</p> <p>Terlebih, ancaman yang ditujukan terhadap program MBG bukan hanya gangguan secara fisik, tetapi juga pembentukan narasi negatif oleh kelompok tertentu yang hendak mengintervensi langkah pemerintah pusat.</p> <p>“Jika masalah ini hanya dihadapi dengan pendekatan represif, maka potensi konflik justru bisa meningkat,” lanjut dia.</p> <p>Khairul menilai, pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat Papua bahwa program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi mereka.</p> <p>Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah perlu memastikan adanya transparansi dalam pelaksanaan program, melibatkan masyarakat lokal, serta melakukan komunikasi secara inklusif.</p> <p>“Jika masyarakat merasa dilibatkan dan mendapatkan manfaat langsung, maka narasi negatif terhadap MBG bisa ditekan,” kata Khairul lagi.</p> <p>Ramai dibicarakan di media sosial, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua menghadapi sejumlah penolakan, bahkan ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).</p> <p>Berdasarkan narasi yang viral di media sosial, ratusan pelajar di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, melakukan aksi penolakan terhadap program MBG.</p> <p>Mereka menuntut pemerintah untuk mengganti program MBG dengan memberikan pendidikan gratis yang dinilai lebih dibutuhkan oleh warga di sana.</p> <p>Sementara, dalam pemberitaan yang berbeda, OPM menolak berjalannya program MBG dan mengancam akan menembak hingga membakar gedung sekolah tempat MBG berlangsung.</p>
5	<p>Polisi Diminta Tindak OPM yang Coba Ganggu MBG di Papua Tanggal: 05 februari 2025 Link: https://nasional.kompas.com/read/2025/02/05/11212801/polisi-diminta-tindak-opm-yang-coba-ganggu-mbg-di-papua</p> 	<p>JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diharapkan dapat melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang mengancam keberlangsungan program makan bergizi gratis (MBG), seperti yang dilakukan OPM di Papua.</p> <p>“Polri, sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri, harus menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang mengancam jalannya program MBG,” ungkap Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, saat dihubungi Kompas.com, pada Selasa (4/2/2025).</p> <p>Khairul menekankan pentingnya koordinasi yang jelas dan terstruktur antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menangani polemik di Papua.</p> <p>“TNI bisa berperan dalam mendukung pengamanan di daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi, terutama wilayah yang sulit dijangkau oleh Polri,” ujar dia.</p>

		<p>Ia juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat mengenai manfaat program MBG, serta membangun kepercayaan warga terhadap negara agar tidak mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang ingin mengintervensi program tersebut.</p> <p>“Jika masyarakat merasa dilibatkan dan mendapatkan manfaat langsung, maka narasi negatif terhadap MBG bisa ditekan,” ujar Khairul.</p> <p>Ancaman terhadap program MBG tidak hanya berupa gangguan fisik, tetapi juga pembentukan narasi negatif oleh kelompok tertentu yang berupaya menghalangi langkah pemerintah pusat.</p> <p>Di media sosial, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua tengah menjadi sorotan, dengan sejumlah penolakan dan ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang merupakan bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).</p> <p>Dari informasi yang beredar, ratusan pelajar di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, melakukan aksi penolakan terhadap program MBG.</p> <p>Mereka menuntut pemerintah untuk mengganti program tersebut dengan pendidikan gratis, yang dinilai lebih dibutuhkan oleh masyarakat setempat.</p> <p>Dalam pemberitaan terpisah, OPM secara tegas menolak pelaksanaan program MBG dan mengancam akan melakukan tindakan ekstrem, termasuk menembak hingga membakar gedung sekolah yang dijadikan lokasi program tersebut.</p>
6	<p>Pelajar di Papua Tolak MBG, Menteri PPPA: Mungkin Belum Tahu Niat Baik Presiden Tanggal: 05 februari 2025</p> <p>Link: https://nasional.kompas.com/read/2025/02/05/17093441/pelajar-di-papua-tolak-mbg-mentri-pppa-mungkin-belum-tahu-niat-baik-presiden</p> 	<p>JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA) Arifah Fauzi memberikan tanggapan terkait penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pelajar di Papua.</p> <p>Menurut Arifah, penolakan tersebut tidak dapat dinilai secara sepihak, dan ia berpendapat bahwa pelajar di Papua mungkin belum sepenuhnya memahami tujuan dari program tersebut.</p> <p>"Enggak bisa langsung dinilai, kita lihat penyebabnya seperti apa. Mungkin belum mengetahui ya sebetulnya yang dilihat adalah niat baik dan ini menunjukkan cita bapak Presiden," kata Arifah, saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).</p> <p>Arifah menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi mendatang sejak dalam kandungan.</p> <p>"Kalau kami dari kementerian melihat bahwa makanan bergizi gratis sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita," ucapnya.</p> <p>Meskipun demikian, Arifah mengungkapkan bahwa ia tidak dapat memberikan komentar lebih jauh mengenai penolakan tersebut, karena hal ini perlu dilihat dari berbagai perspektif.</p> <p>"Ya kita lihat lah (dari berbagai sisi), saya belum berani menilai karena kita harus melihat lebih jauh," ujar dia.</p> <p>Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti juga berkomentar bahwa program</p>

		<p>makan bergizi gratis bakal terus dievaluasi dan disempurnakan demi mendukung kesehatan murid-murid sekolah.</p> <p>"Ya, program ini nantinya masih terus akan dievaluasi dan juga akan terus disempurnakan," ujar Mu'ti saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).</p> <p>Mu'ti menuturkan, berbagai kasus yang terjadi selama masa program MBG ini berjalan akan menjadi evaluasi untuk penyempurnaan.</p> <p>Adapun, viral unggahan di media sosial X yang memperlihatkan ratusan pelajar dari berbagai tingkatan pendidikan di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menolak makan bergizi gratis.</p> <p>Dinarasikan bahwa penolakan program MBG terjadi di Yahukimo, West Papua, pada Senin (3/2/2025).</p> <p>Tuntutan lainnya adalah para pelajar disebut lebih membutuhkan pendidikan yang layak daripada makan gratis.</p>
7	<p>Makan Bergizi Gratis di Papua Ditolak OPM, TNI Tingkatkan Pengamanan Sekolah</p> <p>Tanggal: 05 februari 2025 Link: https://nasional.kompas.com/read/2025/02/05/05351041/makan-bergizi-gratis-di-papua-ditolak-opm-tni-tingkatkan-pengamanan-sekolah</p> 	<p>JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar (Mabes) TNI meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah usai Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengancam bakal membakar sekolah yang menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).</p> <p>Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah (Pemda) setempat.</p> <p>"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.</p> <p>"Kami bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan muridnya," tambahnya.</p> <p>TNI, jelas Kapuspen, sudah mengetahui informasi yang beredar terkait ancaman tersebut.</p> <p>Kini, TNI terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap terkendali.</p> <p>Kapuspen memastikan TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis dalam menghadapi ancaman semacam ini.</p> <p>"TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat sipil," imbuh Kapuspen.</p> <p>"Patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, serta dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan," tambahnya.</p> <p>Lebih lanjut, TNI juga disebut terus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemerintah daerah, untuk menciptakan situasi yang kondusif.</p>

		<p>Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman.</p> <p>"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Jika terdapat perkembangan situasi yang signifikan, TNI akan memberikan update lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan," pungkask Kapuspen.</p> <p>Diberitakan sebelumnya, muncul ancaman dari TNPBP OPM Kodap VIII Intan Jaya yang mengancam akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program Makan Bergizi Gratis.</p> <p>Mereka menilai program MBG adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua.</p>
8	<p>Aliansi Pelajar Papua Tolak MBG, KPAI Minta Pemerintah Dengarkan</p> <p>Tanggal: 11 februari 2025</p> <p>Link: https://nasional.kompas.com/read/2025/02/11/17342941/aliansi-pelajar-papua-tolak-mbg-kpai-minta-pemerintah-dengarkan</p> 	<p>JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah mendengarkan pendapat anak mengenai program makan bergizi gratis (MBG), termasuk apabila ada aspirasi penolakan terkait program tersebut.</p> <p>Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, usai ditanya soal adanya penolakan MBG oleh aliansi pelajar Papua.</p> <p>"Karena kalau kita melihat prinsip-prinsip perlindungan anak, salah satu adalah mendengarkan pendapat anak," kata Jasra dalam jumpa pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).</p> <p>Saran tersebut, jelas Jasra, sudah disampaikan KPAI kepada pemerintah selaku penyelenggara MBG.</p> <p>Ia berharap pemerintah dapat membuat satu forum yang berisi perwakilan anak-anak Indonesia untuk menyatakan pandangannya terkait MBG.</p> <p>"Terkait Papua, saya kira tahapan-tahapan partisipasi anak harus dibangun. Jangan sampai tujuan mulia kita adalah memberikan pemenuhan gizi kepada anak-anak kita yang berada di sekolah, tapi justru terjadi sebaliknya, terjadi penolakan," pesan Jasra.</p> <p>Bukan tidak mungkin, menurut Jasra, pendapat anak justru memberikan solusi bagi pelaksanaan program MBG agar lebih baik.</p> <p>"Karena mungkin anak sendiri pendapatnya lebih jernih daripada kita. Nah, makanya ini penting, ya, ini salah satu rekomendasi kita," tutur Jasra.</p> <p>Sementara itu, Komisioner KPAI, Sylvana Maria A, mengingatkan pentingnya suara-suara atau aspirasi tidak ditunggangi kepentingan orang dewasa.</p> <p>Berdasarkan informasi yang ia terima, penolakan di Papua belum bisa diketahui apakah benar berasal dari anak atau justru orang dewasa.</p> <p>"Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Yahukimo, saya sempat berkoordinasi dengan jejaring di Papua yang memang belum ada satu pun memberi informasi, sebenarnya peristiwa itu apakah berkaitan langsung dengan harapan anak-anak untuk dilibatkan dalam proses makan bergizi gratis, atau ada yang lain," kata Sylvana dalam kesempatan yang sama.</p>

		<p>"Tapi yang jelas, Yahukimo adalah salah satu kabupaten yang teridentifikasi sebagai wilayah konflik," tambah dia.</p> <p>Diberitakan sebelumnya, viral di media sosial X yang memperlihatkan ratusan pelajar dari berbagai tingkatan pendidikan di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menolak makan bergizi gratis.</p> <p>Dinarasikan bahwa penolakan program MBG terjadi di Yahukimo pada Senin (3/2/2025).</p> <p>Tuntutan lainnya adalah para pelajar disebut lebih membutuhkan pendidikan yang layak daripada makan gratis.</p>
9	<p>Demo Tolak MBG di Papua, Istana: Itu Menghalangi Hak Yang Lain</p> <p>Tanggal: 17 februari 2025</p> <p>Link: https://nasional.kompas.com/read/2025/02/17/17092831/demo-tolak-mbg-di-papua-istana-itu-menghalangi-hak-yang-lain</p> 	<p>JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat bicara perihal aksi demonstrasi untuk menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.</p> <p>Aksi tersebut berujung pada bentrokan antara aparat keamanan dan para demonstran.</p> <p>Hasan menyatakan, jika ada warga yang menolak program tersebut, mereka seharusnya dapat menyampaikan ketidaksetujuan mereka tanpa harus melakukan demonstrasi yang berujung pada kekerasan.</p> <p>"Gini, kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan. Tapi, jangan sampai melakukan kekerasan. Kedua, kalau ada yang nolak MBG karena itu hak mereka, boleh tak menerima," ungkap Hasan, di Istana, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).</p> <p>Hasan menekankan pentingnya tidak menghalangi hak warga lain yang ingin mendapatkan manfaat dari program tersebut.</p> <p>"Tapi, jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis. Kalau ada orang yang bilang mereka enggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang, 'kami enggak usah dikasih', enggak apa-apa," tambah dia.</p> <p>Hasan juga mengingatkan bahwa masih banyak orang lain yang membutuhkan akses terhadap makan bergizi gratis.</p> <p>"Tapi, kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak itu, berarti menghalangi hak-hak saudara-saudara yang lain untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis," ujar dia.</p> <p>Massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).</p> <p>Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan "tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)".</p> <p>Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.</p> <p>"Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG)," kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG,</p>

		<p>Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.</p> <p>Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika hanya untuk MBG.</p> <p>Ia menyampaikan, angka buta huruf dan angka kemiskinan di Tanah Papua menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain.</p> <p>Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru yang tidak mengajar aktif.</p> <p>“Kami siswa-siswi yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua,” ujarnya.</p> <p>Dari beberapa video yang beredar dan diterima Kompas.com, pihak aparat keamanan sempat membubarkan massa yang melakukan aksi demonstrasi tolak MBG, sehingga sempat menyebabkan bentrok antara aparat keamanan dan pihak kepolisian di lapangan.</p>
10	<p>Respons Gerinda soal Demo Tolak Makan Bergizi Gratis di Papua</p> <p>Tanggal: 17 februari 2025</p> <p>Link: https://nasional.kompas.com/read/2025/02/17/21243881/respons-gerindra-soal-demo-tolak-makan-bergizi-gratis-di-papua</p> 	<p>JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Gerindra Supratman Andi Agtas menilai, aksi demonstrasi yang menolak pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di Papua merupakan hal yang wajar.</p> <p>Menurut dia, reaksi masyarakat terhadap program baru pemerintah pasti beragam, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan tujuan program tersebut.</p> <p>“Ya biasanya dinamika ya. Jadi ya dijelaskan tujuan dari program makan bergizi gratis itu dalam rangka untuk meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat,” ungkap Supratman, di Gedung DPR RI, Senin (17/2/2025).</p> <p>Supratman menekankan bahwa MBG adalah program unggulan pemerintah yang bertujuan mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas.</p> <p>Ia menambahkan, meskipun dalam satu atau dua bulan pertama mungkin akan ada beberapa persoalan, hal ini adalah hal biasa mengingat program ini baru diluncurkan.</p> <p>“Ini program andalan, bahwa kita menginginkan pembangunan sumber daya manusia itu bisa lebih maksimal. Biasa dalam satu dua bulan ada hal-hal yang masih ada persoalan, karena kan ini baru ya,” ujar dia.</p> <p>Menteri Hukum RI itu juga menegaskan bahwa manfaat dari program MBG tidak akan langsung terlihat dalam waktu singkat, melainkan memerlukan waktu yang lebih panjang.</p> <p>Ia meyakini masyarakat akan perlahan-lahan memahami maksud dan tujuan pemerintah dalam menghadirkan program ini.</p> <p>“Jadi, kita tunggu saja hasilnya, dan kita berharap presiden sudah menyiapkan dana untuk seluruh wilayah Indonesia. Nanti hasilnya pasti akan kelihatan terkait dengan perbaikan gizi, anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke itu pasti akan sangat baik,” pungkas Supratman.</p>

		<p>Diberitakan sebelumnya, Massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).</p> <p>Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan “tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)”.</p> <p>Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.</p> <p>“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relemba, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.</p>
11	<p>Wamendagri Sebut Penolakan MBG di Papua Hanya Masalah Komunikasi</p> <p>Tanggal: 18 februari 2025</p> <p>Link: https://nasional.kompas.com/read/2025/02/18/20485431/wamendagri-sebut-penolakan-mbg-di-papua-hanya-masalah-komunikasi</p> 	<p>JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, menyebut penolakan program makan bergizi gratis (MBG) di Papua hanya karena masalah komunikasi.</p> <p>"Ya, itu kan masalah komunikasinya saja," kata Bima, saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/2/2025).</p> <p>Dia mengatakan, masalah penolakan ini akan dibahas dalam orientasi (retreat) kepala daerah untuk memberikan sosialisasi yang lebih baik.</p> <p>"Nanti kepala daerahnya di sana (Papua) di retreat akan diberikan pemahaman, nanti akan disosialisasikan dengan lebih baik," tutur dia.</p> <p>Bima menegaskan, meskipun Papua termasuk wilayah otoritas khusus, tetap ada negosiasi agar program MBG bisa tetap dijalankan.</p> <p>"Dialog saja, penggunaan otsus itu ke arah mana, apakah bisa dialokasikan untuk MBG," ujar dia.</p> <p>Sebelumnya, massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak MBG di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).</p> <p>Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan tolak makan bergizi gratis.</p> <p>Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.</p> <p>“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relemba, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.</p>
12	<p>Demo Tolak MBG di Papua, Gibran: Makan Bergizi Gratis Penting, Pendidikan Penting</p>	<p>JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) adalah hal yang penting.</p>

<p>Tanggal: 18 februari 2025</p> <p>Link:</p> <p>https://nasional.kompas.com/read/2025/02/18/15141011/demo-tolak-mbg-di-papua-gibran-makan-bergizi-gratis-penting-pendidikan</p> 	<p>Gibran menyatakan ini saat ditanyakan soal adanya aksi demonstrasi untuk menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.</p> <p>"Sekali lagi, makan bergizi gratis penting," ucap Gibran, usai meninjau MBG di SMAN 13 Jakarta Utara, Selasa (18/2/2025).</p> <p>Gibran juga menegaskan bahwa pendidikan dan program cek kesehatan gratis adalah hal penting.</p> <p>"Pendidikan gratis penting. Kesehatan, pengecekan kesehatan gratis penting. Semuanya penting," ujar dia.</p> <p>Gibran berterima kasih atas masukan atau evaluasi dari masyarakat.</p> <p>Menurutnya, setiap masukan dan evaluasi warga akan ditampung oleh pemerintah.</p> <p>"Dan terima kasih sekali untuk masukan evaluasi dari warga. Nanti akan kami tampung dan akan kita tindak lanjuti bersama Pak Presiden, sesuai instruksi dan perintah dari Pak Presiden," ujar dia.</p> <p>Sebelumnya, massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).</p> <p>Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan "Tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)".</p> <p>Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.</p> <p>"Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG)," kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.</p> <p>Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika hanya untuk MBG.</p> <p>Dia menyampaikan bahwa angka buta huruf dan angka kemiskinan di Tanah Papua menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain.</p> <p>Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru yang tidak mengajar aktif.</p> <p>"Kami siswa-siswi yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua," ujarnya.</p> <p>Dari beberapa video yang beredar dan diterima Kompas.com, pihak aparat keamanan sempat membubarkan massa yang melakukan aksi demonstrasi tolak MBG, sehingga sempat menyebabkan bentrok antara aparat keamanan dan pihak kepolisian di lapangan.</p>
--	--

<p>13</p>	<p>Makan Bergizi Gratis ditolak di Papua, Badan Gizi: Belum Tahu Manfaatnya</p> <p>Tanggal: 28 februari 2025</p> <p>Link:</p> <p>https://nasional.kompas.com/read/2025/02/28/17461881/makan-bergizi-gratis-ditolak-di-papua-badan-gizi-belum-tahu-manfaatnya</p> 	<p>JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, orang-orang yang menolak makan bergizi gratis di Papua kemungkinan belum tahu manfaat dari program tersebut.</p> <p>Meski begitu, Dadan memaklumi mereka yang belum tahu manfaat dari program makan bergizi gratis.</p> <p>"Nanti yang berhaknya menolak, ya sementara kami maklumi. Dan mungkin belum tahu manfaatnya. Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujar Dadan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).</p> <p>Dadan mengatakan, pihaknya akan memenuhi permintaan mereka yang tidak mau diberikan makan gratis.</p> <p>Dia menyebut, jika memang mereka menolak, maka Badan Gizi Nasional tidak akan memaksa.</p> <p>"Tapi kami akan persuasi karena pentingnya untuk generasi mendatang," ucapnya.</p> <p>"Kami kan sedang mengerjakan tugas membangun SDM yang berkualitas untuk masa depan. Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan yang berkualitas," sambung Dadan.</p> <p>Diketahui, salah satu penolakan terjadi ketika massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).</p> <p>Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan "tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)".</p> <p>Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.</p> <p>"Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG)," kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relemba, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.</p> <p>Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika hanya untuk MBG.</p> <p>Ia menyampaikan, angka buta huruf dan angka kemiskinan di Tanah Papua menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain.</p> <p>Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru yang tidak mengajar aktif.</p> <p>"Kami siswa-siswi yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua," ujarnya.</p> <p>Dari beberapa video yang beredar dan diterima Kompas.com, pihak aparat keamanan sempat membubarkan massa yang</p>
-----------	--	---

		melakukan aksi demonstrasi tolak MBG, sehingga sempat menyebabkan bentrok antara aparat keamanan dan pihak kepolisian di lapangan.
--	--	--

Lampiran 1.2 Artikel Berita Jubi Papua

No	Judul, Tanggal, Link	Isi Berita
1	<p>Badan Gizi Nasional Nyatakan Tetap Jalankan Perogram Makan Siang Gratis di Tanah Papua.</p> <p>Tanggal: 18 februari 2025</p> <p>Link: https://jubi.id/polhukam/2025/badan-gizi-nasional-nyatakan-tetap-jalankan-program-makan-bergizi-gratis-di-tanah-papua/</p> 	<p>Jayapura, Jubi – Kepala <u>Badan Gizi Nasional</u> atau BGN, Dadan Hindayana mengatakan pemerintah tetap akan melanjutkan program Makan Bergizi Gratis di Tanah Papua. BGN menargetkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjangkau 1.558.000 siswa di Tanah Papua.</p> <p>Hal itu disampaikan Dadan menanggapi sejumlah <u>unjuk rasa pelajar di Tanah Papua yang menolak program Makan Bergizi Gratis</u>. “Badan Gizi Nasional [tetap] fokus menyiapkan dan melaksanakan program Makan Bergizi Gratis,” kata Dadan kepada Jubi melalui layanan pesan WhatsApp pada Selasa (18/2/2025).</p> <p>Pada Senin (17/2/2025), para siswa di berbagai kabupaten/kota di Tanah Papua menggelar demonstrasi damai menolak program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Aksi serentak yang mengatasnamakan Solidaritas Pelajar West Papua itu digelar di Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Aksi serupa juga terjadi di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, serta di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.</p> <p>Aksi serupa juga pernah digelar pelajar di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 3 Februari 2025 lalu.</p> <p>Dadan mengatakan pemerintah menghormati para siswa yang menolak program Makan Bergizi Gratis. Dadan mengatakan pihaknya akan tetap melaksanakan program Makan Bergizi Gratis. “BGN melaksanakan program dan memberikan kepada yang berhak. Jika yang berhak menolak, BGN menghormati,” ujarnya.</p> <p>Dadan mengatakan program Makan Bergizi Gratis akan menjangkau 1.558.000 siswa dari jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK di Tanah Papua. Ia mengatakan program Makan Bergizi saat ini baru menjangkau 30.000 siswa di Tanah Papua.</p> <p>Dadan mengatakan target itu belum termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di Tanah Papua. “1,5 juta siswa itu target <i>ultimate</i> untuk Papua di luar ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Data [ibu hamil, ibu menyusui dan balita] akan diperoleh setelah SPPG [atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] operasional, tapi pada umumnya [berjumlah setara] 10 persen dari jumlah anak sekolah,” katanya.</p> <p>Dadan mengatakan makan bergizi penting untuk kesehatan dan pertumbuhan. Ia menegaskan bahwa asupan gizi seimbang adalah hak setiap anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “Badan Gizi Nasional akan berbuat yang terbaik untuk melakukan pemenuhan gizi tersebut,” ujarnya.</p> <p>Butuh sosialisasi Dosen Universitas Negeri Papua, Agus Sumule mengatakan pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua harus melakukan sosialisasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau</p>

		<p>MBG. Agus menilai sosialisasi MBG di Tanah Papua masih kurang.</p> <p>“Pemerintah daerah harus bisa memberikan penjelasan/sosialisasi [program Makan Bergizi Gratis] kepada masyarakat [maupun pelajar],” kata Agus kepada Jubi, pada Senin (17/2/2025).</p> <p>Agus mengatakan sosialisasi sangat penting guna memberikan pemahaman terkait program itu. Ia juga mengatakan dalam sosialisasi pemerintah kabupaten/kota daerah berkewajiban menerima aspirasi warga yang menolak program itu.</p> <p>“Pemerintah daerah juga berkewajiban menerima aspirasi memang ada yang [menolak]. [Dan] harus dijelaskan dengan baik. Kegiatan [program makan bergizi gratis] harus dikomunikasikan, disosialisasikan dengan baik. Itu tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga tidak ada salah pengertian. Terus terang, saya pu pertanyaan di mana [peran] pemerintah daerah?” tanyanya.</p>  <p>Menurut Agus program makan bergizi gratis ini bukan baru di Tanah Papua. Ia mengatakan program serupa pernah dijalankan di Kabupaten Tolikara pada 2014 lalu oleh Bupati Usman Wanimbo melalui program pemberian makan 1.000 hari pertama kelahiran dan Sarapan Sehat Anak Sekolah. Program itu disebut Sarasehan.</p> <p>“Makan bergizi gratis bukan program baru. Pemberian makan bergizi gratis sudah dijalankan sama Pak Usman Wanimbo [selaku] Bupati Tolikara. Program ini dilakukan terutama [untuk] memastikan adanya pasokan gizi/makanan ke anak-anak,” katanya.</p> <p>Agus mengatakan agar pemerintah pusat lebih melibatkan pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua dalam pelaksanaan MBG. Ia mengatakan pemerintah kabupaten/kota lebih memahami kondisi masyarakatnya.</p> <p>”Apakah [pelibatan TNI dalam program Makan Bergizi Gratis] tujuan untuk gerak cepat? Apakah kegiatan ini juga melibatkan para bupati/distrik? Mereka [pemerintah daerah] ini yang punya rakyat,” katanya.</p> <p>Butuh pendidikan gratis Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis mendapatkan penolakan sejumlah siswa di Tanah Papua. Di Kota Jayapura, siswa yang tergabung yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papuamenggelar demonstrasi damai pada Senin. Mereka menyatakan menolak program makan bergizi gratis atau MBG. Para siswa itu menyatakan lebih baik pemerintah menjalankan program pendidikan gratis.</p> <p>Mereka menggelar demonstrasi dengan membawa spanduk-spanduk bertuliskan ‘Tolak Makan Gratis, Kami Butuh</p>
--	--	---

		<p>Pendidikan gratis’, ‘Hentikan Militerisme di Dunia Pendidikan’, ‘Hentikan pemaksaan MBG terhadap siswa’, serta ‘Kami Tidak Butuh MBG, yang Kami Butuh adalah Pendidikan Gratis’.</p> <p>Ketua Pengurus Sekolah Wilayah (PSW) YPPK Kabupaten Intan Jaya, Pastor Yance Yanuaris Wadogoby Yogi Pr mengatakan sebaiknya program Makan Bergizi Gratis tidak menjadi prioritas di Kabupaten Intan Jaya. Menurutnya, program itu tidak relevan dengan kondisi Intan Jaya sebagai daerah konflik bersenjata, mengingat pelayanan publik telah terhenti di berbagai wilayahnya.</p> <p>Yogi meminta pemerintah di Intan Jaya fokus membenahi dan menjalankan lagi layanan pendidikan di sana. “Kami bukan membutuhkan makanan bergizi gratis,” katanya.</p> <p>Menurut Yogi, banyak sekolah-sekolah di Intan Jaya yang sudah tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yogi meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Intan Jaya.</p> <p>“Aktifkan sekolah-sekolah negeri di beberapa distrik yang tidak aktif. Di daerah konflik, pemerintahan tidak aktif. Kalau memang pemerintah punya hati untuk bangun Papua, mereka [harus] aktifkan kembali sekolah. Segera tegur pejabat yang tidak ada di tempat tugas. Untuk apa pemekaran kabupaten/provinsi, kalau pejabat tidak ada di tempat. [Itu] omong kosong saja itu,” ujar Yogi kepada Jubi melalui panggilan telepon pada Senin (17/2/2025). (*)</p>
2	<p>Rakyat Berhak Menolak Program Makan Bergizi Gratis. Tanggal: 18 Februari 2025 Link: https://jubi.id/polhukam/2025/rakyat-berhak-menolak-program-makan-bergizi-gratis/</p> 	<p>Sorong, Jubi — Aktivis 98, Aznil Tan mengkritik pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi dalam menyikapi <u>demonstrasi para pelajar di Tanah Papua yang menolak program Makan Bergizi Gratis</u> atau MBG. Aznil menilai <u>pernyataan Hasan Nasbi yang menyebut para demonstran menghalang-halangi hak rakyat mendapat makan bergizi gratis berpotensi memecah belah rakyat.</u></p> <p>“Pernyataan seperti ini menciptakan polarisasi. Siapa yang mendukung dianggap membela rakyat, sementara yang mengkritik dituduh menghalangi hak rakyat. Ini pola lama yang pernah digunakan di era Orde Baru untuk membungkam oposisi,” ujar Aznil dalam keterangan pers tertulisnya.</p> <p>Aznil menegaskan masyarakat memiliki hak penuh untuk menolak program Makan Bergizi Gratis, karena program itu dibiayai anggaran negara yang bersumber dari pajak. “Dana MBG berasal dari anggaran negara yang dibiayai oleh pajak rakyat, bukan uang pribadi Prabowo Subianto dan kabinetnya. Karena itu, rakyat berhak menolak atau meminta program ini dievaluasi jika dirasa tidak sesuai prioritas,” ujarnya.</p> <p>Menurutnya, pemerintah seharusnya terbuka terhadap kritik. Pemerintah juga harus memastikan alokasi anggaran digunakan secara efektif untuk kebutuhan esensial masyarakat.</p> <p>Aznil mengkritisi klaim pemerintah yang menyebut MBG sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menilai program ini tidak akan berdampak signifikan jika pemerintah tidak memperbaiki sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan.</p>

		<p>“Gizi yang baik memang penting. Tapi, tanpa pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan memadai, itu hanya akan melahirkan generasi keropos,” kata Aznil.</p> <p>Ia menyebut MBG berisiko menjadi program populis yang lebih mengedepankan pencitraan dibandingkan solusi nyata.</p> <p>Aznil juga menyatakan demonstrasi pelajar di berbagai wilayah Tanah Papua yang menolak program Makan Bergizi Gratis adalah wujud partisipasi publik mengawasi pemerintah. “Apa yang dilakukan mahasiswa Papua adalah wujud partisipasi rakyat dalam mengawasi anggaran negara. Mereka tahu mana yang lebih penting: pendidikan berkualitas. Suara mereka harus didengar, bukan dibungkam,” ujar Aznil.</p> <p>Aznil meminta pemerintah berhenti menggunakan narasi yang memecah belah masyarakat dengan dikotomi “pro-rakyat” dan “anti-rakyat”. Menurutnya, kritik terhadap penggunaan dana negara merupakan hak konstitusional warga negara, dan bagian dari sistem demokrasi.</p> <p>“Kritik terhadap MBG bukan berarti menghalangi hak rakyat, melainkan bentuk pengawasan terhadap pengelolaan anggaran publik. Pemerintah harus membuktikan komitmennya terhadap demokrasi dengan membuka ruang diskusi, bukan membungkam kritik,” ujarnya. (*)</p>
3	<p>Unjuk Rasa Tolak Makan Bergizi Gratis Pelajar di Nabire Diangkut ke Mapolres. Tanggal: 17 Februari 2025 Link: https://jubi.id/meepago/2025/unjuk-rasa-tolak-makan-bergizi-gratis-pelajar-di-nabire-diangkut-ke-mapolres/</p> 	<p>Nabire, Jubi – Puluhan siswa yang umumnya berpakaian SMA (Sekolah Menengah Atas) di Nabire, Provinsi Papua Tengah menggelar aksi unjuk rasa menolak program <u>Makan Bergizi Gratis (MBG)</u>, Senin (17/2/2024). Namun di tengah perjalanan mereka diangkut polisi dengan truk Dalmas ke Markas Polisi Resor Nabire.</p> <p>Para pelajar yang menamakan diri Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Nabire itu memulai aksi dengan berkumpul di Pasar Karang Tumaritis. Mereka kemudian berjalan kaki menyusuri Jalan Jenderal Sudirman menuju Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat.</p> <p>Namun baru bergerak setengah kilometer, sesampai di depan Gereja GKI Sion, Kampung Harapan, Nabire mereka diminta polisi untuk naik ke truk Dalmas, lalu dibawa ke Markas Polres Nabire yang berjarak 1,1 km. Di kantor Polres mereka dikumpulkan di halaman dan diberikan pengarahan.</p> <p>Seorang siswa yang ikut unjuk rasa mengatakan para siswa menolak Makan Bergizi Gratis karena banyak pengalaman yang ditayangkan di televisi, akibat makan siang gratis tersebut banyak siswa keracunan makanan.</p> <p>“Kami menilai program makan siang gratis ini bisa berdampak buruk bagi kami, sehingga kami tolak,” ujarnya.</p>



Siswa yang tidak mau namanya disebutkan itu mengatakan program makan siang bergizi gratis yang menjadi program Prabowo Subianto-Gibran tersebut seharusnya diubah menjadi program pendidikan gratis.

“Pendidikan gratis untuk siswa-siswi di seluruh Tanah Papua, digratiskan tanpa biaya sepeser pun, karena kalau soal makan kami bisa membuat kebun dan makan makanan dari hasil bumi kami,” katanya.

Ia juga menyampaikan alasan, pendapatan orang tua siswa berbeda-beda. Ada yang mampu dan ada yang tidak mampu membiayai hidup anaknya, karena itu bantuan makan siang untuk semua siswa tidak tepat.

“Pemerintah harus berpikir baik juga soal ini,” katanya.

Kapolres sebut pola-polanya mengarah ke KNPB

Usai menangani para siswa yang berunjuk rasa, Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan para siswa tersebut salah menyampaikan aspirasi. Menurutnya aspirasi tersebut disampaikan ke pihak sekolah.

Kapolres menyampaikan para siswa berasal dari dua hingga empat sekolah di Nabire. Mereka bergerak dari arah Pasar Karang dan diamankan di depan Gereja Sion.

“Kita ada periksa dua orang, satu dari Jayapura dan satunya lagi dari Dogiyai. Kami mau bertanya alasan mereka datang ke Nabire untuk mengomandoi aksi, oleh siapa dan sebagainya,” katanya.

Kapolres menyebutkan pola-pola yang digunakan para siswa [saat berunjuk rasa] mengarah kepada Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

“Pola-pola yang mereka gunakan, tali, di noken bergambar bendera Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan lambang, mengarah ke sana,” ujarnya.

Terkait aspirasi menolak MBG, menurut Kapolres bisa diselesaikan di sekolah masing-masing. AKBP Samuel Tatiratu juga menyebutkan para siswa dikomandoi oleh orang-orang dari Jayapura.

“Sudah terlihat jelas di situ ada KNPB yang memprovokasi adik-adik,” ujarnya.

AKBP Samuel Tatiratu mengaku kasihan kepada pelajar yang berunjuk rasa karena diamankan berpanas-panas.

		<p>“Kalau mereka kita amankan panas-panas begini, siapa yang mau bertanggung jawab? Coba bayangkan, kalau semua mereka turun, jalan raya macet, lalu terjadi kaos (<i>chaos</i>) di jalan, mereka ini kemudian menjadi korban,” katanya.</p> <p>Kapolre melanjutkan, “Tolonglah kita semua berpikir tentang bangsa ini ke depan, berikan kesempatan kepada mereka menjadi generasi yang baik.”</p> <p>Program makan siang gratis, kata Kapolres, dijalankan dan ketika awal diluncurkan di Nabire dilakukan ‘tester’ [dicipi] dulu oleh sejumlah pejabat, seperti dandim, kapolres, pejabat Dinas Pendidikan, bupati, dan lainnya.</p> <p>“Terkait makan siang gratis akan diuji oleh Balai Gizi Nasional,” ujarnya.</p> <p>Kadinas Pendidikan akan tingkatkan sosialisasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Dina Pidjer menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada Kapolres Nabire yang melakukan langkah cepat dalam menangani siswa yang berencana menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.</p> <p>“Terima kasih kepada Kapolres beserta jajaran yang telah mengamankan anak-anak kami. Ini adalah wujud kepedulian [Polres] terhadap dunia pendidikan di Nabire. Mereka [siswa yang ikut unjuk rasa] telah kembali ke sekolah dan menyadari bahwa tugas utama mereka adalah belajar, bukan berdemo,” katanya.</p> <p>Menurut Dina Pidjer tindakan Kapolres dan jajarannya merupakan bentuk perhatian terhadap dunia pendidikan, serta upaya menyelamatkan anak-anak dari kegiatan yang tidak diinginkan pihak sekolah.</p> <p>Terkait aksi protes siswa, Dina Pidjer mengatakan pihaknya berencana meningkatkan sosialisasi kepada siswa, guru, dan kepala sekolah agar lebih memperhatikan penyadaran kepada anak-anak.</p> <p>“Kami akan mengimbuu seluruh kepala sekolah dan guru untuk terus memberikan pemahaman kepada siswa agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif, tetapi fokus kepada pendidikan,” katanya.</p> <p>Ia berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Jika hal itu kembali terjadi, katanya, sekolah hanya bertanggung jawab untuk membina, sementara tindakan hukum akan diserahkan kepada pihak yang berwenang.</p> <p>“Kami sudah melakukan sosialisasi, tetapi ternyata anak-anak yang berdemo adalah mereka yang sebelumnya tidak hadir pada pengarahan di sekolah,” ujarnya. (*)</p>
4	<p>Aparat Keamanan Blokade Demonstrasi Solidaritas Pelajar West Papupa Menolak MBG. Tanggal: 17 Februari 2025 Link: https://jubi.id/polhukam/2025/aparat-keamanan-blokade-</p>	<p>Jayapura, Jubi – Puluhan pelajar se-Kota Jayapura yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua atau SPWP menggelar aksi demo damai menolak <u>Makanan Bergizi Gratis atau MBG</u> dan menuntut pendidikan gratis di areal putaran Taksi Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Senin (17/2/2025). Aksi demo pelajar tersebut dijaga ketat dan diblokade keliling oleh puluhan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri.</p> <p>Dari pantauan Jubi di lokasi, pukul 12.10 WP puluhan pelajar dengan seragam lengkap putih abu-abu turun ke jalan dari arah Universitas Cenderawasih ke lingkaran Perumnas III, dengan</p>

[demonstrasi-solidaritas-pelajar-west-papua-menolak-mbg/](https://www.jubi.id/demonstrasi-solidaritas-pelajar-west-papua-menolak-mbg/)



membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan penolakan terhadap MBG.

Bunyi spanduk-spanduk tersebut antara lain: “Solidaritas Pelajar West Papua Tolak Makan Gratis, Kami Butuh Pendidikan gratis”, “Hentikan Militarisme di Dunia Pendidikan”, “Hentikan pemaksaan MBG terhadap siswa,” serta “Kami Tidak Butuh MBG, yang Kami Butuh adalah Pendidikan Gratis”.

Setibanya massa aksi pelajar di putaran Perumnas III, orasipun mulai digelar. Mereka menyampaikan alasan menolak MBG, program prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran. Para pelajar berorasi secara bergantian dari masing-masing perwakilan sekolah.

“MBG bukan solusi untuk memberdayakan SDM di Tanah Papua. Kami menuntut pemerintah agar menggantikan MBG dengan pendidikan gratis bagi siswa siswi di 6 Provinsi di Tanah Papua dari Sorong sampai Merauke,” ujar Fernando Ahayon, pelajar SMA Negeri 7 Jayapura.

Perwakilan pelajar lainnya turut menegaskan bahwa masyarakat asli Papua tidak kekurangan pangan. Masalah pendidikan bukan masalah kurangnya pangan.

“Tanpa makanan gratis kita tidak kekurangan makanan, makanan di Papua itu banyak. Banyak teman-teman tidak sekolah, ada yang putus sekolah bukan karena tidak makan tapi karena tidak mampu bayar uang sekolah,” ujarnya Yeskiel Walela, pelajar SMA YPPK Taruna Darma, dalam orasinya. Terlihat aparat keamanan memberikan kesempatan kepada pelajar menyampaikan orasi atau aspirasinya. Namun penyampaian aspirasi mereka itu tidak bisa dilihat langsung oleh orang-orang yang lewat karena berlangsung dalam blokade aparat keamanan yang mengelilingi massa aksi.

Beberapa kali pelajar meminta buka ruang agar bisa menyampaikan orasi dan aspirasi ke hadapan publik untuk didengarkan. Namun aparat keamanan tidak membuka ruang itu hingga aksi pelajar akhirnya usai dan membubarkan diri.

Kapala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Heram, AKP Bernadus Yunus Ick, kepada Jubi mengatakan aksi yang dilakukan para pelajar itu telah ditangani dengan baik oleh pihak aparat keamanan. Sesuai keputusan dari pimpinan, dalam hal ini Pemerintah Kota Jayapura, dan ditindaklanjuti oleh aparat keamanan. Ia menjelaskan bahwa aksi pelajar ini sudah melalui surat izin ke Polresta Jayapura Kota. Namun menurut AKP Yunus berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan kepolisian, izin tidak dikeluarkan.

“Tapi hari ini kegiatan anak-anak tetap dilakukan. Maka kami dalam hal ini bapak Kapolresta Jayapura Kota memberikan ruang untuk anak-anak kita menyampaikan aspirasi di muka [umum]. Ini kebijakan pimpinan jadi kami harap anak-anak kita ini silahkan sampaikan aspirasi dimuka umum,” katanya.

Kapolsek menambahkan personil yang turun mengawal terdiri dari gabungan personil TNI Polri jajaran Polresta, koramil dan

		<p>polsek Hedam. Menurutnya semua berjalan baik sehingga anak-anak membubarkan diri setelah selesai. (*)</p>
5	<p>Agendakan Demonstrasi Tolak MBF, Massa Aksi SPWP Belum Terlihat. Tanggal: 17 Februari 2025 Link: https://jubi.id/mamta/2025/agen-dakan-demonstrasi-tolak-mbg-massa-aksi-spwp-belum-terlihat/</p> 	<p>Jayapura, Jubi – Hingga Senin (17/2/2025) pukul 11.30 WP, massa aksi Solidaritas Pelajar West Papua atau SPWP belum terlihat di berbagai titik kumpul di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Padahal mereka mengagendakan demonstrasi untuk menolak program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Senin pukul 09.00 WP.</p> <p>Yang terlihat justru polisi dan Brimob yang menjaga sejumlah lokasi strategis di Kota Jayapura. Di Lingkaran Abepura misalnya, ada dua mobil Brimob dan dua mobil polisi. Sekitar 30 orang polisi juga terlihat berjaga di sana.</p> <p>Massa aksi menolak program MBG direncanakan berkumpul di sejumlah titik kumpul, yaitu Sentani, Waena, Abepura. Massa aksi itu akan berunjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua.</p> <p>Kepala Kepolisian Sektor Kota Abepura, Komisaris Komarul Huda mengatakan ada sekitar 135 personel yang disiapkan untuk mengawal demonstrasi itu. Mereka adalah personel Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota, Kepolisian Sektor Kota Abepura, TNI, dan Brimob.</p> <p>Menurut Komaru, pada Minggu (16/2/2025) telah berlangsung pertemuan daring para kepala sekolah yang membicarakan rencana demonstrasi Solidaritas Pelajar West Papua atau SPWP itu. Komarul menyatakan sebagian besar kepala sekolah tidak setuju dengan rencana demonstrasi menolak program MBG. “Kemarin kami sudah melakukan zoom dengan kepala sekolah di Jayapura terkait demo hari ini. Mereka tidak setuju ada demo itu. Makanya masing-masing sekolah [akan] mengunci pintu pagarnya, dan siswanya dilarang untuk demo,” kata Komarul.</p> <p>Akan tetapi, jajaran Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota tetap disiagakan hingga Senin sore. Mereka juga akan mengantisipasi reaksi atas putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang rencana akan dibacakan pada Senin. (*)</p>
6	<p>Amnesty International Indonesia: Hentikan Intimidasi Pelajar yang Demo Tolak MBG. Tanggal: 19 Februari 2025 Link: https://jubi.id/rilis-pers/2025/amnesty-international-indonesia-hentikan-intimidasi-pelajar-yang-demo-tolak-mbg/</p> 	<p>Jayapura, Jubi – Amnesty International Indonesia menyatakan pelarangan dan penangkapan para pelajar yang berunjuk rasa untuk menolak program Makan Bergizi Gratis di Tanah Papua merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM. Amnesty International Indonesia menyeru polisi dan Aparatur Sipil Negara untuk menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap pelajar yang berunjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis atau MBG.</p> <p>Hal itu dinyatakan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid melalui keterangan pers tertulisnya pada Selasa (18/2/2025). Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi tindakan berlebihan polisi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap aksi protes pelajar sekolah yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah kota di Tanah Papua.</p> <p>“Mencegat, apalagi menangkap siswa yang hendak melakukan aksi damai menolak program MBG tanpa alasan hukum yang dibenarkan, adalah bentuk pelanggaran HAM yang sangat nyata yang dipertontonkan oleh kepolisian di Tanah Papua. Penggunaan tembakan peringatan serta gas air mata dalam</p>

	<p>merespons aksi pelajar yang sedang berdemonstrasi jelas berlebihan,” kata Usman.</p> <p><u>Dalam insiden di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, aparat kepolisian mengadang puluhan pelajar yang hendak bergerak menuju lokasi demonstrasi dan membawa mereka dengan truk ke kantor polisi.</u> Beredar pula video viral yang memperlihatkan seorang ASN berseragam coklat menendang tubuh dan menginjak kaki seorang pelajar sambil menghardik dengan ucapan yang merendahkan martabat anak saat para pelajar dikumpulkan di kantor polisi. “Kamu ini masih anak-anak kecil, masih ingusan,” kata ASN itu sambil memegang bagian kepala siswa tersebut.</p> <p>Terlihat beberapa ASN lain dan polisi, yang berdiri di depan para pelajar yang duduk bersila di lantai, hanya menyaksikan pemandangan itu. Laporan media menyebutkan, ASN yang terlihat menendang dan menghardik pelajar tersebut adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire.</p> <p>Sementara itu, di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, polisi dilaporkan melepaskan 12 kali tembakan peluru dan gas air mata saat menghadapi aksi protes pelajar yang menolak program MBG. Di Kota Jayapura, Papua, sebanyak 15 pelajar SMP dan SMA sempat ditangkap saat hendak mengikuti aksi protes dan dipulangkan setelah diperiksa polisi di Mapolsek Heram. Juga muncul laporan dugaan kekerasan aparat atas pelajar saat menangkap peserta aksi. Di Kota Wamena, Papua Pegunungan, aparat kepolisian menghadapi demonstrasi pelajar dengan menembakkan gas air mata.</p> <p>Usman mendesak kepolisian mengusut apakah tindakan oleh anggotanya tersebut sudah sesuai aturan. Ia menyatakan mengeluarkan tembakan peringatan dan menembakkan gas air mata secara serampangan merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM oleh aparat.</p> <p>Ia menegaskan polisi harus memastikan bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan bukanlah solusi dalam merespons aksi protes di Papua. Apalagi para demonstran itu adalah pelajar sekolah yang secara damai menyampaikan aspirasi mereka menolak program MBG.</p> <p>Usman juga mengkritik seorang ASN yang menendang seorang siswa sekolah. Ironisnya aksi kekerasan terhadap anak tersebut terjadi di depan mata polisi yang seharusnya melindungi siswa Papua dari segala bentuk ancaman.</p> <p>Sikap anti-kritik yang dinormalkan lewat penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat dan ASN Papua harus segera dihentikan. Polisi harus dengan segera melakukan investigasi yang mendalam terhadap anggotanya yang menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam merespons aksi protes siswa di Kabupaten Nabire di Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Yalimo dan Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan, serta Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua.</p> <p>Kepolisian juga harus memproses hukum ASN yang tertangkap kamera menginjak seorang siswa, karena tindakan tersebut melanggar <u>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.</u> Kepolisian juga harus memproses anggotanya yang telah lalai membiarkan terjadinya aksi</p>
--	--

		<p>kekerasan yang dilakukan ASN terhadap pelajar yang berunjukrasa.</p> <p>Amnesty International Indonesia menyatakan intimidasi dan kekerasan terhadap pelajar yang berunjuk rasa merupakan bagian dari taktik yang digunakan pemerintah Indonesia dalam meredam suara kritis terkait program MBG di berbagai daerah lainnya di Indonesia. “Negara harus terbuka menerima kritik dari siswa bukan malah meredamnya,” demikian keterangan pers Amnesty.</p> <p>Amnesty menegaskan anak-anak pun memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan melakukan protes damai. Anak-anak yang menyuarakan pendapatnya secara damai justru harus dilindungi, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Konvensi Hak-Hak Anak. Konvensi Hak-Hak Anak (<u>Convention on the Rights of the Child</u> – CRC) menjamin hak anak untuk berekspresi, termasuk dalam bentuk demonstrasi damai di jalan. “Negara juga harus menjamin keamanan dan perlindungan bagi anak-anak yang menyuarakan pendapatnya secara damai, sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak,” demikian keterangan pers Amnesty. (*)</p>
7	<p>Mengapa Pelajar Papua Menolak MBG?.</p> <p>Tanggal: 24 Februari 2025</p> <p>Link: https://jubi.id/opini/2025/mengapa-pelajar-papua-menolak-mbg/</p> 	<p>Berbagai pemberitaan di media massa beberapa minggu terakhir, menginformasikan bahwa program prestisius Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis atau MBG gagal mendapat simpati dari para pelajar di tanah Papua. Berbagai pelajar di Yahukimo, Jayapura, Nabire, Dogiyai maupun Manokwari kembali melancarkan aksi protes terhadap program ini.</p> <p>Mereka melakukan protes dengan menggelar sejumlah aksi damai di beberapa kota besar di tanah Papua.</p> <p>Maraknya aksi protes ini menunjukkan bahwa para pelajar Papua, memiliki cara pandang yang berbeda dengan pemerintah pusat, dalam menyelesaikan persoalan pendidikan di tanah Papua.</p> <p>Aksi ini pun lantas menghebohkan seluruh warga Indonesia, sekaligus melahirkan berbagai pertanyaan reflektif seperti: mengapa hal ini bisa terjadi? Alasan Apa yang mendasari penolakan program nasional ini? Pelajaran apa yang dapat diperoleh dari aksi protes ini?</p> <p>Alasan penolakan MBG di Papua Kebijakan top down dan sentralistis Penolakan MBG hendak menunjukkan, bahwa pemerintah pusat yang dikomandoi secara sentralistis dan <i>top down</i>, mengikuti watak rezim Orde Baru gagal mengidentifikasi akar persoalan pendidikan di Papua.</p> <p>Kebijakan publik yang dirumuskan secara <i>top down</i> dan sentralistis mengakibatkan substansi kebijakan, gagal mengakomodasi sejumlah aspirasi dan tuntutan yang disuarakan berbagai lapisan masyarakat di berbagai daerah.</p> <p>Sama halnya dengan program MBG yang dirumuskan secara terpusat oleh Pemerintah Pusat, dengan agenda menjalankan visi besar presiden ternyata membawa konsekuensi besar yang tak dapat dihindari.</p> <p>Sejak awal program ini lahir dari janji kampanye presiden, yang kemudian dipaksakan secara terpusat, dengan menggunakan kekuasaan yang sentralistis. Alih-alih mengatasi permasalahan,</p>

	<p>program ini sudah menuai penolakan sebelum diimplementasikan di tanah Papua. Kebijakan publik seyogyanya tidak dirumuskan dan diformulasikan secara terpusat dan eksklusif.</p> <p>Seharusnya kebijakan ini perlu menyaring berbagai aspirasi masyarakat Papua, diantaranya, para pelajar Papua yang notabene merupakan subjek atau target penerima kebijakan.</p> <p>Ruang diskusi dan partisipasi inklusif sudah seharusnya dibuka secara lebar pada tahap formulasi kebijakan MBG ini. Berbagai stakeholder terkait yang menyelenggarakan proses pendidikan di Papua, perlu diajak diskusi guna mendapatkan masukan, saran dan input kebijakan.</p> <p>Hal ini dimaksudkan untuk menampung dan menjaring berbagai aspirasi masyarakat Papua, yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.</p> <p>Pengabaian terhadap hal ini mengakibatkan kebijakan MBG hanya merupakan agenda pemerintah pusat, yang sama sekali tidak relevan dan kontekstual dengan permasalahan di level daerah.</p> <p>Dengan kata lain, praktik manajemen pemerintahan dengan gaya sentralistis dan <i>top down</i> hanya melahirkan kebijakan yang tidak inklusif, dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat Papua.</p> <p>Upaya desentralisasi dan penguatan otonomi daerah Dampak lanjutan dari perumusan kebijakan MBG secara sentralistis, menunjukkan pemerintah gagal memahami esensi dari otonomi daerah atau yang dikenal dengan nama desentralisasi. Akhir-akhir ini semua kebijakan, termasuk MBG, diputuskan secara terpusat tanpa mempertimbangkan apakah semua daerah di Indonesia memiliki permasalahan yang sama, sehingga membutuhkan solusi yang sama pula. Seharusnya pemerintah daerah perlu diberikan kewenangan, untuk merumuskan kebijakan strategis di setiap daerah, karena pemerintah daerahlah yang mengenal dan memahami persoalan di daerahnya.</p> <p>Padahal amanat Undang-Undang Otonomi Khusus atau UU Otsus Papua telah memberikan keberpihakan dan sejumlah afirmasi kepada orang asli Papua (OAP), dalam menempuh pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.</p> <p>Komitmen ini yang perlu diperkuat dan ditingkatkan melalui tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bukan malah mendikte pembuatan kebijakan pendidikan secara terpusat, yang akhirnya melemahkan kewenangan khusus pemerintah daerah di Papua.</p> <p>Status Otsus Papua seharusnya sudah jelas menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan di tanah Papua, perlu memperhatikan kepentingan, tuntutan dan aspirasi OAP itu sendiri.</p> <p>Situasi akhir-akhir ini malah menunjukkan sebuah pembangkangan dan penguatan terhadap Otsus Papua.</p> <p>Otsus Papua menegaskan keberpihakan secara politik, ekonomi sosial dan budaya, terhadap kepentingan dan aspirasi OAP. Bukan sebaliknya pemerintah pusat yang mengambil alih semua perumusan kebijakan yang bersifat nasional, dengan mengabaikan aspirasi masyarakat setempat.</p>
--	--

	<p>Berbagai kondisi tata kelola seperti saat inilah yang menunjukkan adanya upaya desentralisasi otonomi daerah di Indonesia.</p> <p>Gagal mendiagnosis masalah Penolakan MBG menunjukkan pemerintah pusat gagal mendiagnosis akar permasalahan pendidikan di Papua. Tahapan perumusan dan formulasi kebijakan, sama sekali tidak memperhatikan substansi permasalahan.</p> <p>Dalam hal ini perlu diperhatikan struktur dan anatomi masalah pendidikan di Papua, yang tentunya memiliki karakteristik, tingkat kerumitan dan solusi yang berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Hasil riset Ibaadurrahman dkk (2024) menunjukkan pendidikan di Papua masih menemui sejumlah tantangan, seperti, minimnya infrastruktur, kekurangan tenaga pengajar, dan kesenjangan kualitas pendidikan masih signifikan.</p> <p>Tingginya disparitas kualitas pendidikan di Papua, seharusnya menjadi isu utama pembuatan kebijakan publik di bidang pendidikan. Studi ini juga menegaskan masih terdapat sejumlah tantangan struktural, geografis dan kultural, yang turut mewarnai sejumlah masalah pendidikan di Papua.</p> <p>Tidak hanya hasil riset, data Statistik Pendidikan yang dirilis BPS tahun 2024 juga masih menunjukkan hal yang sama, bahwa kualitas pendidikan pada semua aspek dan Indeks Pembangunan Manusia di Papua, masih menempati urutan terakhir di Indonesia.</p> <p>Dengan demikian, dapat diketahui bahwa masalah pendidikan di Papua tidaklah tunggal, melainkan bersifat kompleks dan tidaklah sederhana.</p> <p>Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak serta-merta dengan MBG. Ada jurang pemisah yang tegas, antara tujuan kebijakan MBG dengan realitas permasalahan pendidikan di Papua.</p> <p>Pada titik inilah kebijakan MBG sama sekali bukan merupakan jawaban, dari berbagai persoalan pendidikan di tanah Papua. Wajar saja dan dapat dipahami apabila para pelajar Papua lebih memilih pendidikan gratis daripada MBG.</p> <p>Aksi protes pelajar Papua ingin menyampaikan bahwa praktik kebijakan <i>one size fits all</i> yang sedang diterapkan pemerintah saat ini perlu ditinggalkan, karena tidak relevan dan kontekstual dengan sejumlah persoalan di daerah.</p> <p>Pengabaian partisipasi publik Pengolahan program MBG mengindikasikan minimnya ruang diskusi dan partisipasi, yang dilakukan pada tahap penjarangan aspirasi masyarakat Papua. Ruang partisipasi yang minim dan tertutup mengakibatkan program ini gagal menjawab inti persoalan pendidikan di Papua. Berbagai stakeholder yang berkecimpung di urusan pendidikan di Papua seperti para pelajar, tenaga pengajar, tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga agama, dan berbagai unsur pemerintah daerah setempat, tidak mendapatkan ruang partisipasi yang layak, sehingga aspirasi mereka pun sama sekali tidak diperhitungkan. Apalagi diakomodasi dalam substansi kebijakan.</p>
--	---

		<p>Proses perumusan kebijakan yang tertutup dan eksklusif seperti ini, hanya akan mendatangkan sejumlah penolakan dan resistensi dari penerima kebijakan. Sama halnya dengan program MBG di Papua, yang berakhir dengan sejumlah penolakan massal oleh pelajar Papua.</p> <p>Pemerintah seharusnya membuka diskusi publik, khususnya, di Papua karena persoalan pendidikan di Papua, membutuhkan penanganan yang berbeda.</p> <p>Penyelenggara urusan pendidikan di Papua pun melibatkan berbagai lembaga keagamaan, yang tentunya pihak-pihak ini pun perlu didengar aspirasinya.</p> <p>Pengabaian partisipasi publik dalam penjangkaran aspirasi pada gilirannya hanya melahirkan suatu kebijakan yang tidak relevan dan tidak menjawab akar persoalan.</p> <p>Solusi</p> <p>Perubahan kebijakan MBG merupakan hal mendesak, dengan memperhatikan sejumlah permasalahan inti di bidang pendidikan, yang selama ini dirasakan oleh para pelajar di Papua. Mulai dari aspek ketersediaan fasilitas pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kualitas pendidikan, kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, ketersediaan dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan dan masalah tata kelola pemerintah daerah, perlu menjadi agenda kebijakan pemerintah, agar kebijakan pendidikan di Papua bisa menyelesaikan sejumlah persoalan ini.</p> <p>Program MBG yang menelan anggaran besar dinilai kurang efektif dan tidak menjawab akar persoalan. Oleh karena itu, sebaiknya program MBG ini dikombinasikan atau disinergikan dengan berbagai program peningkatan kualitas pendidikan di Papua secara menyeluruh, seperti meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, bantuan biaya sekolah sampai jenjang pendidikan tinggi, perbaikan infrastruktur, dan tata kelola urusan pendidikan di Papua.</p> <p>Kolaborasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta dan lembaga keagamaan dalam memajukan pendidikan di Papua perlu dilakukan.</p> <p>Selain itu, pemerintah daerah pun perlu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang memadai dengan berpedoman pada desain Otsus Papua.</p> <p>Tata kelola pemerintahan atau manajemen pemerintahan di Papua, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan pendidikan secara prima sebagaimana diharapkan.</p> <p>Terutama OAP harus menjadi prioritas penerima manfaat semua kebijakan di bidang pendidikan. Hal ini dilakukan guna menjamin rasa keadilan dan percepatan pembangunan manusia di tanah Papua. (*)</p>
8	<p>LBH Papua Protes Dugaan Polisi Pukul Pelajar Saat Aksi Tolak Makan Gratis.</p> <p>Tanggal: 18 Februari 2025</p> <p>Link: https://jubi.id/polhukam/2025/lb-h-papua-protos-dugaan-polisi-</p>	<p>Jayapura, Jubi – Polisi diduga menganiaya peserta aksi pelajar tolak Program Makanan Bergizi Gratis di Kota Jayapura, kemarin. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mengancam tindakan polisi tersebut.</p> <p>Pemberi Bantuan Hukum dari LBH Papua Imanus Komba mengatakan dugaan penganiayaan dialami dua pelajar saat polisi menangkap para peserta aksi. Mereka cedera akibat tindak kekerasan tersebut.</p>

	<p>pukul-pelajar-saat-aksi-tolak-makan-gratis/</p> 	<p>“Kami mendapati dua pelajar diduga dipukul polisi. Mereka mengalami luka dan benjol pada kening,” kata Komba, Senin (17/2/2025).</p> <p>LBH Papua memprotes dugaan penganiayaan tersebut. Mereka menilai polisi telah melanggar konstitusi. “Kebebasan menyampaikan pendapat itu dijamin Undang Undang Dasar 1945. Jadi, apa pun alasan, dan bagaimana pun kondisinya [kebebasan tersebut] tidak bisa dibatasi,” kata Komba.</p> <p>Ada 15 pelajar ditangkap polisi saat aksi kemarin. Mereka kemudian digelandang ke Polsek Heram.</p> <p>Menurut saksi mata, polisi mengadang pelajar saat di halaman sekolah. “Saat kami baru kumpul, polisi dengan bersenjata lengkap masuk ke sekolah. Mereka tampar dua teman kami, dan memasukkan ke mobil. Lalu, dikeluarkan lagi beberapa menit kemudian,” kata seorang pelajar.</p> <p>Jubi. id telah menghubungi Kepala Polsek Heram Ajun Komisaris Polisi Bernadus Yunus Ick, untuk memastikan dugaan penganiayaan terhadap pelajar tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, Ick belum merespons permintaan keterangan dari Jubi.id.</p> <p>Namun, dia sebelumnya mengatakan pelajar tersebut bukan ditangkap, melainkan diamankan. Menurut Ick, aksi itu tidak diizinkan, tetapi para pelajar tetap berkeras menggelangnya.</p> <p>“Kami hanya mengamankan adik-adik ini. Sebentar nanti, mereka juga dipulangkan,” kata Ick, saat mengamankan aksi para pelajar, kemarin. (*)</p>
<p>9</p>	<p>IPMY di NTT Dukung Kasi Aliansi Pelajar Se-Yahukimo Tolak MBG. Tanggal: 05 Februari 2025 Link: https://jubi.id/rilis-pers/2025/ipmy-di-ntt-dukung-aksi-aliansi-pelajar-se-yahukimo-tolak-mbg/</p> 	<p>Nabire, Jubi – Ikatan Pelajar Mahasiswa Yahukimo (IPMY) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung aksi Aliansi Pelajar se-Yahukimo menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta alokasi anggaran pemerintah kabupaten lebih baik untuk peningkatan kualitas pendidikan di Yahukimo.</p> <p>Mengutip siaran pers IPMY kota studi NTT yang diterima Jubi, Selasa (4/2/2025), program Makan Bergizi Gratis menurut para pelajar mahasiswa bukanlah program yang mendesak dibutuhkan di dunia pendidikan.</p> <p>“Kami mahasiswa Yahukimo di kota studi NTT menolak kebijakan pemerintah “Makan Bergizi Gratis”. Sebab dalam dunia pendidikan makan gratis itu bukan hal urgen [mendesak], tetapi yang lebih dibutuhkan justru pendidikan gratis,” tulis IPMY.</p> <p>Mereka menjelaskan kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Yahukimo yang lebih membutuhkan perhatian ketimbang program MBG.</p> <p>” Kabupaten Yahukimo lebih membutuhkan sarana prasarana pendidikan seperti laboratorium komputer, laboratorium Bahasa Inggris, laboratorium Biologi dan Perpustakaan sekolah, hingga pengadaan buku-buku pelajaran. Kami meminta Negara Indonesia, melalui Pemkab Yahukimo khususnya dinas pendidikan, segera menyiapkan kebutuhan pokok siswa semacam ini,” tulis IPMY.</p> <p>Mereka mengingatkan bahwa kebutuhan makanan sehari-hari bagi rakyat Yahukimo, khususnya para pelajar, telah tersedia sejak lama sehingga tidak perlu ada makan gratis lagi. “Jika</p>

		<p>orang Papua atau lebih khusus siswa lapar pasti makan di rumah karena makanan alami yang lebih bergizi telah tersedia, kami hanya mengambil di kebun dan makan,” lanjutnya.</p> <p>IPMY menuntut Pemerintah Kabupaten Yahukimo agar secara tegas menolak MBG. “Kami juga menghimbau kepada Pemkab Yahukimo bahwa uang yang telah dialokasikan untuk makan siang gratis tersebut, segera [alihkan untuk] melengkapi dan membiayai pendidikan gratis di Kabupaten Yahukimo,” katanya.</p> <p>Mereka juga meminta agar Pemkab Yahukimo memastikan ketersediaan tenaga pendidik dan buku-buku pelajaran, ketimbang sibuk dengan program Makan Bergizi Gratis. (*)</p>
10	<p>Aliansi Pelajar Se-Yahukimo Gelar Aksi Tolak Program Makan Gratis.</p> <p>Tanggal: 03 Februari 2025</p> <p>Link: https://jubi.id/rilis-pers/2025/aliansi-pelajar-se-yahukimo-gelar-aksi-tolak-program-makan-gratis/</p> 	<p>Yahukimo, Jubi – Aliansi pelajar Se-Yahukimo menggelar aksi demo damai dengan sorotan tema: “Sekolah bukan warung tetapi sekolah tempat belajar”, Senin, 3 Februari 2025.</p> <p>Aksi demo damai pelajar SD, SMP, SMA, SMK itu berlangsung selama 7 jam, pukul 09-15.00 waktu setempat. Terhitung mulai dari titik berangkat hingga masuk ke titik sentral di Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.</p> <p>Aksi tersebut tidak hanya dilakukan dan dihadiri oleh pelajar tetapi dihadiri oleh setiap pihak yakni, perwakilan pemerintah, guru-guru, orangtua siswa, mahasiswa, pemuda dan komponen lainnya.</p> <p>Setiap perwakilan yang hadir telah menyatakan sikap lewat orasi-orasi bahwa mereka tidak sepakat adanya pemberian makanan gratis di sekolah.</p> <p>Berikut sikap setiap perwakilan, sebagaimana siaran pers yang diterima <i>Jubi</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Aliansi Pelajar Se-Yahukimo , kami tidak pernah meminta makan gratis ke negara karena kami tidak memerlukan makanan. Yang kami butuhkan saat ini adalah pendidikan gratis yang berkualitas, ilmiah, dan demokratis. 2. Perwakilan kepala suku Umu, anak kami yang berpendidikan bukan anak tiri atau yatim-piatu, anak-anak kami punya bapa dan mama sehingga jangan bikin kayak tidak punya orang tua. kami kepala suku adat Tolak keras program presiden Prabowo-Gibran, karena kami tahu bahwa Prabowo adalah pemburu andalan di Papua di masa lalu hingga saat ini. 3. Perwakilan (PGGJ). Kami sebagai gembala Jemaat , sudah tidak sanggup melihat domba-domba kami mati dimana-mana akibat kejahatan yang terstruktur. Dengan demikian untuk program makan gratis ini kami tolak dengan keras dan tegas agar program tersebut diberhentikan. 4. Perwakilan Guru. Sesungguhnya ada kejanggalan dari program menu makan gratis. Kenapa kami katakan sedemikian, karena program ini langsung dari pemerintah pusat diturunkan ke sekolah dan tidak melalui pemerintah daerah. mengingat dengan itu kami akan tetap ada di sisi anak-anak siswa untuk melakukan penolakan. 5. Penanggung jawab aksi. Hari ini siswa dijadikan sebagai objek untuk

		<p>memperkaya para penguasa, sistem pendidikan di Papua sangat minim. Walaupun kita ada di kurikulum merdeka, sekarang kepala dinas pendidikan dan guru-guru gagal untuk membangun sumber daya manusia Papua, pada akhirnya kepala dinas juga gagal menyelidiki manfaat dari program ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pembacaan pernyataan sikap tolak menu makan gratis. 7. Pemerintah : <p>Aspirasi pelajar ini kami terima dan kami akan teruskan ke bupati untuk melakukan pemberhentian terhadap pembagian makanan gratis di sekolah sekolah.</p> <p>Hasil akan kami beritahukan setelah kami melakukan pertemuan dengan bupati kabupaten Yahukimo.</p> <p>Catatan Dari Penanggung jawab kepada pemerintah: Dari sikap penolakan makanan gratis oleh semua pihak ini menjadi alasan hukum yang mendasar, agar aktivitas pembagian makanan gratis dihentikan. Tetapi Jika aktivitas pembagian makanan gratis masih dilakukan maka kami Aliansi Pelajar Se-Yahukimo akan konsolidasi besar-besaran untuk mogok pendidikan di seluruh Yahukimo.</p> <p>Demikian pernyataan sikap, dengan mencantumkan nama koordinator aksi, Feron Kabak dan Penanggung jawab Doni Sie. (*)</p>
11	<p>Aliansi Pelajar Se Kabupaten Paniai Tolak Program Makan Bergizi Gratis Tanggal: 24 februari 2025 Link: https://jubi.id/meepago/2025/ali-ansi-pelajar-se-kabupaten-paniai-tolak-program-makan-bergizi-gratis/</p> 	<p>Nabire, Jubi – Pelajar Se Kabupaten Paniai yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se Kabupaten Paniai menggelar Longmarch sejauh 4 kilometer. Dimulai dari lapangan Karel Gobai menuju ke Kantor Bupati di Madi, Senin (24/2/2025).</p> <p>Koordinator lapangan Aliansi Pelajar Se Kabupaten Paniai Alpius Tebai mengatakan, tujuan diselenggarakan aksi itu untuk menolak program nasional makan bergizi gratis yang digadang-gadang Presiden Republik Indonesia dan wakilnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.</p> <p>Tebai mengatakan yang dibutuhkan pelajar di Kabupaten Paniai adalah pendidikan gratis, bukan makanan gratis.</p> <p>“Makanan bergizi itu selalu disiapkan oleh orang tua kami. Mereka menyiapkan kami makan sehari tiga kali. Soal makanan kami tidak susah. Karena alam juga ikut menyediakan segalanya. Yang kami susah adalah biaya pendidikan. Kami meminta pendidikan harus digratiskan,” katanya.</p> <p>Tebai mengatakan, siswa dan siswi se kabupaten Paniai meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paniai dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, agar melanjutkan pernyataan sikap mereka ke pemerintah pusat.</p> <p>“Penolakan ini dilakukan agar ke depan tidak ada program makanan bergizi gratis itu lagi. Melainkan pendidikan digratiskan, sarana prasarana dilengkapi,” katanya.</p> <p>Koordinator lapangan umum Apornalis Domai Yogi, menyampaikan program makanan bergizi yang dijalankan tidak sesuai dengan harapan siswa dan dinilai tidak efektif.</p>

	<p>“Kami ingin pemerintah lebih fokus pada pendidikan gratis daripada memberikan makanan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan kami,”katanya.</p> <p>Yogi mengakui di sisi lain, beberapa guru dan orang tua menyayangkan aksi ini. Mereka beralasan program itu bertujuan untuk meningkatkan gizi serta kesehatan dan kualitas belajar siswa.</p> <p>“Meskipun kami diberi penjelasan terkait makan siang gratis, namun, mereka juga memahami bahwa akses pendidikan gratis merupakan harapan banyak keluarga di Paniai, selama ini aspirasi itu tidak pernah tersampaikan sehingga kami sampaikan hari ini,”katanya.</p> <p>Yogi, mengklaim sumber dari makanan bergizi gratis yang diberikan kepada siswa sekolah di Paniai, seperti daging dan beras, berasal dari luar Paniai. Menurutnya hal itu berisiko. Daging yang disuguhkan bisa terkontaminasi jika tidak dijaga higienitasnya.</p> <p>“Kami butuh makanan yang benar-benar bergizi, bukan sekadar gratis karena beberapa fakta makan siang gratis tidak sehat dikonsumsi. Banyak kasus di Indonesia menyebabkan pingsan, sakit perut dan lain lain,”katanya.</p> <p>Kepala Sekolah Dasar (SD) Yegeka Enarotali Paniai Nurdiyanto mengatakan, pada hari ini, Senin 24 Januari 2025, beberapa guru di Sekolah Dasar Yegeka Enarotali ikut mengawal aspirasi dari Aliansi Siswa dan Pelajar (ASP) Paniai yang melakukan aksi demo damai “Menolak Makanan Bergizi Gratis, Menuntut Pendidikan Gratis”.</p> <p>“Kami sangat memahami pergumulan hati para orang tua murid, khususnya orang tua anak-anak asli Papua, terhadap program makan gratis ini. Kami memilih untuk memahami dan menghargai kegelisahan orang tua dan anak-anak siswa. Sehingga kami juga bertanggungjawab memastikan anak-anak yang ikut kegiatan itu berjalan aman,”katanya.</p> <p>Nurdiyanto mengatakan, anak-anak kami yang ikut aksi ini baru duduk di bangku SD kelas V dan VI.</p> <p>“Kami, para guru, mengambil kebijakan hanya anak-anak di bangku kelas V dan VI yang boleh hadir dan ikuti undangan aksi dari aliansi. Oleh karena itu hari kami, khususnya para guru lelaki SD Yegeka Enarotali Paniai, hadir sambil sekadar membawakan minum dan permen untuk anak-anak didik kami,”katanya.</p> <p>Nurdiyanto mengatakan, dirinya sebetulnya sedih karena pihaknya melihat sedikit guru-guru ada di tengah-tengah para siswa. Padahal banyak guru-guru yang sudah mendapatkan pekerjaan tetap, baik sebagai pegawai maupun kontrak di Paniai.</p> <p>“Kehadiran guru menurut kami penting karena tugas kita adalah menemani dan melayani pergumulan anak didik kita. Pekerjaan guru adalah pekerjaan pelayanan dengan hati dan nurani. Apa yang menjadi keresahan anak didik wajib kita dengarkan dan coba pahami. Tetapi kami tetap bersyukur. Terima Kasih Tuhan, aksi damai berlangsung dengan baik. Anak-anak sudah ungkapkan isi hatinya,”katanya.</p>
--	--

		<p>Aksi itu dijaga ketat aparat kepolisian Resor Paniai. Aspirasi peserta aksi diterima langsung oleh asisten 1 Soleman Boma, Anggota DPRD Kabupaten Paniai, Kapolres Paniai.</p> <p>Asisten 1 Kabupaten Paniai Soleman Boma menerima aspirasi dari Aliansi Pelajar Se Kabupaten Paniai. Boma mengatakan aspirasi akan dilanjutkan kepada bupati terpilih.</p> <p>“Aspirasi yang disampaikan oleh para pelajar ini akan disampaikan di Bupati dan DPRD Paniai, dibahas lebih lanjut terkait aspirasi dari pelajar sekabupaten Paniai,”katanya.(*)</p>
12	<p>Ribuan Pelajar di Deiyao Demo Tolak Makan Bergizi Gratis Tanggal: 26 Februari 2025 Link: https://jubi.id/polhukam/2025/ribuan-pelajar-di-deiyai-demo-tolak-makan-bergizi-gratis/</p> 	<p>Nabire, Jubi – Ribuan pelajar di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, berunjuk rasa pada Rabu (26/2/2025). Mereka menolak program Makan Bergizi Gratis atau MBG, dan meminta pemerintah membuat program pendidikan gratis.</p> <p>Para pelajar yang berunjuk rasa itu siswa berbagai sekolah tingkat SMP, SMA, dan SMK yang tergabung dalam Solidaritas Siswa Siswi Kabupaten Deiyai. Mereka berkumpul dan berunjuk rasa di Lapangan Thomas Adii sejak pukul 08.20 WP, lalu berpawai menuju Kantor Bupati Deiyai.</p> <p>Koordinator demonstrasi itu, Damianus Dawapa saat dihubungi Jubi melalui panggilan telepon pada Rabu menjelaskan bahwa dalam unjuk rasa itu ia telah membacakan pernyataan sikap Solidaritas Siswa Siswi Kabupaten Deiyai untuk menolak program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. “Program tersebut menjadi sorotan penolakan publik di kalangan rakyat dan pelajar se-Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Tengah,” katanya.</p> <p>Dawapa mengatakan program Makan Bergizi Gratis tidak menguntungkan pelajar di Tanah Papua, dan tidak akan memajukan pembangunan sektor pendidikan. Hingga kini, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di Papua Tengah belum terpenuhi, namun anggaran Pemerintah Kabupaten Deiyai justru terpengkas efisiensi pemerintah pusat.</p> <p>Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis ini tidak menjamin kemajuan pendidikan dan peningkatan mutu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Dawapa menegaskan pelajar di Deiyai lebih membutuhkan pendidikan gratis yang bermutu ketimbang program Makan Bergizi Gratis. Ia mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai memprioritaskan program sesuai dengan konteks kebutuhan daerah.</p> <p>Dalam pernyataan sikapnya, Solidaritas Siswa Siswi Kabupaten Deiyai menyatakan menolak pemangkasan anggaran pendidikan Dana Otonomi Khusus Papua untuk membiayai Makan Bergizi Gratis. Mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten Deiyai memperhatikan sarana dan prasaran pendidikan yang dibutuhkan sekolah, demi meningkatkan mutu pendidikan di Deiyai.</p> 

		<p>Para pelajar itu juga meminta Pemerintah Kabupaten Deiyai membuka program beasiswa yang membiayai pendidikan keguruan, karena kabupaten di Papua Tengah itu masih kekurangan guru. Selain itu, mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Deiyai membuat perpustakaan di setiap sekolah.</p> <p>“Kami pelajar se-Kabupaten Deiyai tidak membutuhkan Makan Bergizi Gratis. Yang kami butuhkan adalah pendidikan yang memadai dan gratis. Pemerintah Kabupaten Deiyai harus membenahi sekolah yang kini tidak menjalankan kegiatan belajar mengajar,” ujar Dewapa saat membacakan pernyataan sikap Solidaritas Siswa Siswi Kabupaten Deiyai.</p> <p>Dawapa mengatakan, pihaknya lebih mencintai makanan yang tuhan berikan dari alam Deiyai ketimbang makan siang bergizi gratis dari pemerintah. “Tuhan sudah memberikan alam yang kaya makanan yang berlimpah kepada kami di Deiyai. Saya meminta pemerintah pusat bikin program pendidikan gratis daripada Makan Bergizi Gratis,” katanya.</p> <p>Ketua Komisi A DPR Kabupaten Deiyai, Yason Edowai menemui para pelajar dan menerima aspirasi mereka. “Setelah menerima aspirasi ini, kami akan sampaikan kepada pemerintah daerah, dan kami akan membahas bersama pemerintah. Setelah itu kami akan kembali mengumumkan [hasil pembahasan itu] kepada para pelajar dan publik,” katanya.</p> <p>Penjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Deiyai, Melianus Package mengatakan pihaknya menerima aspirasi para pelajar itu. “Terima kasih adik-adik pelajar yang datang menyampaikan aspirasi. Saya berpesan agar generasi muda terutama pelajar dapat membaca buku sebanyak banyaknya. Saya pesan generasi muda harus membaca buku lagi, bukan baca status di media sosial,” katanya.</p> <p>Package mengatakan program pemerintah dan kebutuhan masyarakat harus dipahami sama-sama, baik pemerintah dan masyarakat. “Ini antara program pemerintah dan kebutuhan masyarakat, ini harus menjadi landasan pemikiran ke depan, terutama bagaimana kami rembuk untuk menyatakan sikap kami,” katanya.</p> <p>Package menjelaskan kepada para pelajar bahwa Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah pusat, sehingga Pemerintah Kabupaten Deiyai tidak bisa menghapuskan program itu. “Kalau [itu] Pemerintah Kabupaten Deiyai punya program, ya [bisa] hari ini kami bilang sudah kami hapus, kami tiadakan. Tapi ini program pemerintah pusat,” katanya. (*)</p>
13	<p>Pelajar Papua Desak Prabowo Berikan Pendidikan Gratis, Istana: Itu hak mereka Tanggal: 17 februari 2025 Link: https://jubi.id/mamta/2025/pelajar-papua-desak-prabowo-berikan-pendidikan-gratis-istana-itu-hak-mereka/</p>	<p>Jayapura, Jubi – Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) di Kota Jayapura mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis di Tanah Papua. Mereka menilai pendidikan gratis lebih mendesak dibandingkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), karena banyak pelajar yang terpaksa putus sekolah akibat ketidakmampuan membayar biaya pendidikan.</p> <p>“Harapan kami, pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto dapat mendengarkan seruan kami. Kami di Tanah Papua butuh pendidikan gratis, bukan MBG,” kata Fernando Ahayon, pelajar SMA Negeri 7 Jayapura, saat aksi di Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Senin (17/2/2025).</p> <p>Fernando menjelaskan, SPWP menolak program makan siang gratis dan meminta agar anggaran MBG dialihkan untuk</p>

	<p>pendidikan gratis. Menurutnya, aksi ini telah diberitahukan secara resmi kepada pihak keamanan dan disertai surat penolakan terhadap MBG.</p> <p>“Tapi saat kami hendak aksi, aparat kepolisian menghadang di beberapa sekolah dan berjaga di titik-titik kumpul SPWP yang hendak menuju Dinas Pendidikan Provinsi Papua untuk menyampaikan aspirasi kami,” ujar Fernando. Fernando menyebutkan, massa SPWP berkumpul di beberapa titik, seperti Ekspo, Abepura, Permunas III Waena, dan Sentani. Tujuan utama mereka adalah menyampaikan tuntutan pendidikan gratis kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua.</p> <p>“Aksi ini tidak hanya berlangsung di Kota Jayapura. Teman-teman di Kabupaten Jayapura, Mimika, Nabire, Intan Jaya, Jayawijaya, Dogiyai, Yahukimo, dan Yalimo juga turut menolak MBG dan menuntut pendidikan gratis,” jelasnya.</p> <p>Fernando menambahkan, penolakan ini didasari kenyataan bahwa banyak orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Ia menyarankan agar anggaran MBG dialihkan ke sekolah-sekolah di Papua untuk mewujudkan pendidikan gratis.</p> <p>“Kami tidak butuh makanan gratis. Yang kami butuhkan adalah pendidikan gratis agar kami bisa terus bersekolah dan mengembangkan kemampuan kami. Banyak teman kami putus sekolah karena orang tua tidak mampu,” tegas Fernando.</p> <p>Arianus Seoh Kabak, salah seorang anggota SPWP, juga menolak MBG dan mendesak pemerintah memprioritaskan pendidikan gratis. Menurutnya, alokasi dana MBG sangat besar dan tidak tepat sasaran karena hanya menguntungkan siswa dari keluarga mampu.</p> <p>“Pendidikan gratis jauh lebih penting. Makanan bisa didapatkan di mana saja, tapi pendidikan membutuhkan biaya. MBG hanya menguntungkan anak-anak orang kaya, sementara anak-anak petani tetap tidak bisa sekolah. Lebih baik anggaran itu dialihkan untuk pendidikan gratis,” ujar Arianus.</p> <p>Menanggapi aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa wilayah di Papua, termasuk di Wamena, Istana buka suara terkait penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi demonstrasi yang melibatkan ratusan pelajar di Wamena pada Senin (17/2/2025) berujung ricuh. Para pelajar menolak program MBG dan meminta agar anggarannya dialihkan untuk pendidikan gratis.</p> <p>Dilansir dari Suara.com, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengingatkan agar aksi demonstrasi tidak menghalangi hak pihak lain untuk menerima manfaat dari program tersebut.</p> <p>“Kalau ada yang nolak makan bergizi gratis karena itu hak mereka boleh tidak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis,” kata Hasan Nasbi.</p> <p>Lebih lanjut, pihak Istana meminta semua pihak untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan bijaksana, tanpa mengganggu ketertiban umum. Mereka juga mengajak para pelajar untuk berdialog dan mencari solusi terbaik terkait permasalahan pendidikan di Papua.</p>
---	---

		<p>“Kalau ada orang yang bilang mereka gak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang ‘kami gak usah dikasih’, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu halangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, saudara-saudara dia juga untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis,” tutup Hasan Nasbi. (*)</p>
--	--	--



Lampiran 3. Sertifikat LDK



Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup

GHINA KAMILAH Mahasiswa

Tangerang Selatan, Indonesia | HP: 081294551724 | Email: ghinakamilah068@gmail.com

RINGKASAN

Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang antusias dengan hal baru dengan optimis dan pekerja keras, tekun dalam mengerjakan tugas dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Saya juga menikmati bekerja dengan tim maupun individu.

PENGALAMAN

COMOTION 2024 – Universitas Pembangunan Jaya

Sekretaris Comotion (2024)

- Menyusun dan membuat proposal acara.
- Membuat dan menyusun laporan kerja setelah acara selesai.
- Menyiapkan segala kebutuhan persuratan, file, dll dalam acara.
- Menghandle pendaftaran peserta sebanyak 500 orang.

HIMPUNAN MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI – Universitas Pembangunan Jaya

Anggota Divisi Akademik (2022 – 2023)

- Menyusun program kerja sesuai kebutuhan akademik mahasiswa ilmu komunikasi
- Membuat lomba iklan layanan masyarakat melalui kolaborasi dengan event Cofest 2022, dengan pencapaian jumlah peserta 14 kelompok.
- Membuat proposal, evaluasi dan laporan kerja untuk lomba iklan layanan masyarakat.
- Melakukan riset sederhana terkait kebutuhan akademik dan menjadi wadah bagi mahasiswa ilmu komunikasi.

PANITIA KOM AWARDS 2023 – Universitas Pembangunan Jaya

Koor Divisi Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi (PDD) (2023)

- Membuat ide dan design keseluruhan terkait Kom Awards 2023.
- Menjadi operator selama kegiatan Kom awards berlangsung.
- Mengawasi tugas PDD selama kegiatan berlangsung.

PANITIA LDBI TINGKAT SMA – Universitas Pembangunan Jaya

Time Keeper Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA (2023)

- Menjadi time keeper dalam lomba debat selama beberapa sesi.
- Mencatat waktu dan membantu juri dalam mengatur waktu debat.

PANITIA TALKSHOW KOMUNIKASI POLITIK – Universitas Pembangunan Jaya

Hubungan Masyarakat Talkshow Komunikasi Politik "Menuju Indonesia Emas 2045" (2023)

- Membuat daftar peserta yang telah mendaftar pada talkshow.
- Menjaga dan membantu pelaksanaan registrasi peserta sebelum acara dimulai.

COURSERA

(2021 – Saat ini)

- Mempelajari dan melatih skill untuk marketing dan pengetahuan seputar google.

KETUA EKSKUL – SMA Negeri 11 Tangerang Selatan

(2020 – 2021)

- Bertanggung jawab dalam melaksanakan ekstrakurikuler.

PENGHARGAAN

- Konsultan kampanye online terbaik pada proyek "Pendampingan Media Sosial Komunitas dan UMKM" KOM AWARDS 2024
- Karya produksi berita televisi terbaik 2024 - KOM AWARDS 2024

PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA (2021- Present)

S1 Ilmu Komunikasi (Broadcasting Journalism) – IPK 3.40

KEMAMPUAN

- Creative Thinking
- Effective Communication
- Microsoft Office
- Camera Person

Lampiran 5. Bimbingan Skripsi

NIM	2021041003	Nama Mahasiswa	GHINA KAMILAH
Program Studi	Ilmu Komunikasi	Jenis TA	Skripsi
Periode Mulai	2024/2025 Genap	SKS Lulus	136 SKS
Tgl. Mulai	19 Mei 2025	Judul Tugas Akhir	Pembingkaihan Berita Penolakan MBG di Papua pada Media Online Nasional dan Lokal
Tahap	Seminar Hasil	Status	Aktif

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	21 Februari 2025	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom., C.Ht.	Bimbingan 1	✓	
2	26 Februari 2025	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom., C.Ht.	Bimbingan 2	✓	
3	5 Maret 2025	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom., C.Ht.	Bimbingan 3	✓	
4	19 Maret 2025	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom., C.Ht.	Bimbingan 4	✓	
5	13 April 2025	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom., C.Ht.	Bimbingan 5	✓	
6	14 April 2025	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom., C.Ht.	Bimbingan 6	✓	
7	4 Juni 2025	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom., C.Ht.	Bimbingan 7	✓	
8	13 Juni 2025	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom., C.Ht.	Bimbingan 8	✓	
9	18 Juni 2025	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom., C.Ht.	Bimbingan 9	✓	



Lampiran 6. Bukti Cek Plagiarisme



9.58%

SIMILARITY OVERALL

SCANNED ON: 14 JUL 2025, 2:11 PM

Similarity report

Your text is highlighted according to the matched content in the results above.

● IDENTICAL 0.03% ● CHANGED TEXT 9.55% ● QUOTES 0.62%

Report #27479277

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Program kerja dari presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto beserta wakilnya Gibran Rakabuming Raka adalah program makan bergizi gratis yang menjadi perhatian publik mulai dari dipaparkannya program kerja sampai saat ini pelaksanaan programnya. Program makan bergizi gratis ini tidak selalu mendapatkan dukungan dari setiap daerah yang menerima program makan bergizi gratis atau disingkat MBG. Daerah yang dengan jelas menolak Makan Bergizi Gratis ini adalah Papua, banyak dari siswa di Papua tidak setuju dengan adanya program ini, program yang dianggap tidak terlalu penting dikarenakan isu terkait makanan di Papua memang sudah ada sejak lama, banyak dari mereka lebih membutuhkan adanya sekolah gratis (Metro TV, 2025). Pada Senin, 17 Februari 2025, ribuan pelajar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, menggelar aksi unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi ini melibatkan siswa tingkat SMP, SMA, hingga mahasiswa. Penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis didasari oleh pandangan bahwa masyarakat Papua saat ini lebih membutuhkan pendidikan gratis daripada bantuan makanan bergizi. Namun, dalam laporan mengindikasikan bahwa partisipasi sebagian pelajar dalam aksi tersebut tidak sepenuhnya didorong oleh inisiatif pribadi. Ditemukan adanya pengaruh dari pihak luar yang turut mendorong keterlibatan para siswa dan mahasiswa, termasuk kelompok seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB).